



ENERGI BARU
**ANAMBAS
MAJU**



RANCANGAN AKHIR RENJA BAPPEDA

2026



Jl. Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perkantoran
Daerah, Lt. 3, Tarempa Timur, Siantan, Kabupaten
Kepulauan Anambas, 29791.



+62-812-7730-7410



bappeda@anambaskab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
KATA PENGANTAR		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
	2.4 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	29
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	29
	3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V	PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 2.2	Program/Kegiatan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025	7
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kab. Kep. Anambas	10
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2024	11 9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas	17
Tabel 2.6	<i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2026	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026	31
Tabel 3.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Bappeda 2026	32
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kab. Anambas Tahun 2026	36



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Rancangan Akhir Renja PD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan akhir RKPD. Rancangan Akhir Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Selanjutnya, dengan telah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026, dapat dilihat sejauh mana kinerja OPD dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif.

Tarempa, 11 September 2025

KEPALA BADAN,



ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST

Pembina Tk.I

NIP. 19820701 201001 1 019

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kab. Kep. Anambas, Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda Prov. Kep. Riau.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026 yang merujuk dari rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kep. Anambas, agar program/ kegiatan/ sub kegiatan yang disusun benar-benar menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada. Disamping itu, penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan juga telah memperhatikan program prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, tahun 2025 merupakan

tahun ke-4 (empat) perencanaan pembangunan Kab. Kep. Anambas yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dimana visi yang hendak dicapai yaitu : "Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II".

Selanjutnya Renja PD dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan akan bertransformasi menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kep. Anambas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappeda Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2026 Kabupaten

- Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 ialah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 adalah :

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Memuat pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, *review* terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berisi indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

Bab V Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Dalam pelaksanaan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2025, implementasi terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal tersebut diatas juga menjadi *“concern”* tersendiri di lingkungan Bappeda Kab. Kep. Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	38 Orang
2.	Perempuan	26 Orang
	Jumlah	64 Orang

Dari tabel diatas, kondisi pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2025 adalah sejumlah 64 orang, yang terdiri dari 38 orang pegawai laki-laki dan 26 orang pegawai perempuan. Pelaksanaan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2025, Bappeda Kab. Kep. Anambas melaksanakan 2 urusan, 4 program, 14 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH PAGU (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.970.438.325
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 391.010.745
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 232.165.700
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 158.845.045
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.234.795.704
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.847.835.704
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 306.960.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 80.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 210.346.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 79.690.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 130.656.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.305.214.341
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 67.192.130
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 117.942.798
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 41.516.936
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 131.247.625
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 117.529.852
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 683.785.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 136.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 736.717.721
Pengadaan Mebel	Rp 302.156.798
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 331.194.363
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 103.366.560
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.978.315.794
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 27.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 120.634.858
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.830.680.936
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.038.020
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 78.038.020
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.239.966.950
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.906.050.350
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 11.250.000

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp	427.869.500
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp	54.180.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.412.750.850
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	90.172.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp	90.172.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	243.744.600
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	243.744.600
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	928.230.510
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	445.685.200
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	124.926.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	45.734.800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	26.375.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	5.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	135.576.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	86.198.400
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	16.875.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	5.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	185.954.810
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	43.792.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	9.317.500
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	14.410.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp	2.350.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	54.918.310
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	43.792.000

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	12.375.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp	5.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	296.590.500
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	149.721.800
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	62.692.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	18.675.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	7.050.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	19.896.700
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	2.975.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	30.580.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	5.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	333.215.194
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp	128.526.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Datad dan Pengkajian Peraturan	Rp	128.526.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	204.689.194
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	19.679.250
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp	185.009.944
TOTAL	Rp	14.471.850.979

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebesar Rp. 4.166.043.063,- atau 28,79% dari total anggaran sebesar Rp.14.471.850.979,. Selanjutnya, Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Ketercapaian (%)
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Indeks Perencanaan	91,33	86,66	94,88
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab.Kep.Anambas	Indeks RB Bappeda	59 (CC)	65,59 (B)	111
Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	29,17	28,57	97,94

Pengukuran kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas diukur dalam 3 sasaran strategis dan 3 Indikator kinerja yaitu Indeks Perencanaan dengan tingkat ketercapaian 94,88%, Indeks RB Bappeda dengan tingkat ketercapaian 111%, Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan tingkat ketercapaian 97,94%. Selanjutnya, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2024 dan pencapaian Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d TW II Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN			
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.970.438.325	75,81	2.768.340.983	3.827.761.115	34,89	26,45		58,51		7.142.677.210
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	391.010.745	2,70	74.896.825	44.346.707	11,34	0,31		1,35		346.664.038
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	232.165.700	1,60	52.826.900	44.346.707	19,10	0,31	50,00	0,80		187.818.993
Evaluasi kinerja perangkat daerah	158.845.045	1,10	22.069.925	-	0,00	-	50,00	0,55		158.845.045
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.234.795.704	43,08	1.610.175.198	2.735.351.002	43,87	18,90		21,70		3.499.444.702
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.847.835.704	40,41	1.553.495.198	2.631.170.276	44,99	18,18	50,00	20,20		3.216.665.428
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	306.960.000	2,12	23.060.000	57.690.000	18,79	0,40	50,00	1,06		249.270.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000	0,55	33.620.000	46.490.726	58,11	0,32	78,44	0,43		33.509.274
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.346.000	1,45	-	-	0,00	-		0,73		210.346.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.690.000	0,55	-	-	0,00	-	50,00	0,28		79.690.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.656.000	0,90	-	-	0,00	-	50,00	0,45		130.656.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.305.214.341	9,02	339.410.000	249.502.484	19,12	1,72		4,15		1.055.711.857
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.192.130	0,46	-	-	0,00	-	50,00	0,23		67.192.130
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.942.798	0,81	46.760.000	-	0,00	-	52,51	0,43		117.942.798
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.516.936	0,29	17.700.000	-	0,00	-	50,00	0,14		41.516.936

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.247.625	0,91	50.200.000	23.785.200	18,12	0,16	51,68	0,47		107.462.425
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117.529.852	0,81	-	41.066.836	34,94	0,28	50,00	0,41		76.463.016
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	0,07	750.000	-	0,00	-	50,00	0,03		10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.785.000	4,72	200.000.000	184.650.448	27,00	1,28	41,67	1,97		499.134.552
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	136.000.000	0,94	24.000.000	-	0,00	-	50,00	0,47		136.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	736.717.721	5,09	103.366.560	58.072.450	7,88	0,40		16,70		678.645.271
Pengadaan Mebel	302.156.798	2,09	-	-	0,00	-	50,00	15,09		302.156.798
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	331.194.363	2,29	-	-	0,00	-	50,00	1,14		331.194.363
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.366.560	0,71	103.366.560	58.072.450	56,18	0,40	65,17	0,47		45.294.110
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.978.315.794	13,67	612.496.400	740.148.472	37,41	5,11		13,48		1.238.167.322
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	0,19	14.000.000	16.018.000	59,33	0,11	63,33	6,74		10.982.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.634.858	0,83	36.150.000	31.894.825	26,44	0,22	50,00	0,42		88.740.033
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.830.680.936	12,65	562.346.400	692.235.647	37,81	4,78	50,00	6,32		1.138.445.289
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.038.020	0,79	27.996.000	340.000	0,30	0,00		0,39		113.698.020
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	78.038.020	0,54	15.800.000	340.000	0,44	0,00	50,00	0,27		77.698.020
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000	0,25	12.196.000	-	0,00	-	50,00	0,12		36.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.239.966.950	15,48	374.448.500	194.205.312	8,67	1,34		7,85		2.045.761.638
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.906.050.350	13,17	303.305.000	163.520.219	8,58	1,13		6,70		1.742.530.131
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	11.250.000	0,08	11.250.000	-	0,00	-	50,00	0,04		11.250.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	427.869.500	2,96	149.063.000	51.521.400	12,04	0,36	50,25	1,49		376.348.100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	54.180.000	0,37	54.180.000	35.020.000	64,64	0,24	78,28	0,29		19.160.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.412.750.850	9,76	88.812.000	76.978.819	5,45	0,53	50,00	4,88		1.335.772.031

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90.172.000	0,62	24.738.000	20.308.060	22,52	0,14		0,31		69.863.940
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	90.172.000	0,62	24.738.000	20.308.060	22,52	0,14	50,00	0,31		69.863.940
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	243.744.600	1,68	46.405.500	10.377.033	4,26	0,07		0,84		233.367.567
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	243.744.600	1,68	46.405.500	10.377.033	4,26	0,07	50,00	0,84		233.367.567
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	928.230.510	6,41	338.911.500	131.295.636	14,14	0,91		3,02		796.934.874
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	445.685.200	3,08	196.349.900	32.430.994	7,28	0,22		1,11		413.254.206
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.926.000	0,86	27.566.000	22.485.994	18,00	0,16	0,50	0,00		102.440.006
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	45.734.800	0,32	25.248.000	-	0,00	-	50,00	0,16		45.734.800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26.375.000	0,18	1.150.000	9.945.000	37,71	0,07	50,00	0,09		16.430.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	0,03	5.000.000	-	0,00	-	50,00	0,02		5.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.576.000	0,94	60.000.000	-	0,00	-	50,00	0,47		135.576.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	86.198.400	0,60	61.385.900	-	0,00	-	50,00	0,30		86.198.400
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.875.000	0,12	13.000.000	-	0,00	-	50,00	0,06		16.875.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.000.000	0,03	3.000.000	-	0,00	-	41,67	0,01		5.000.000

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	185.954.810	1,28	53.827.500	18.635.460	10,02	0,13		0,66		167.319.350
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.792.000	0,06	5.690.000	18.635.460	42,55	0,03	50,00	0,03		25.156.540
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.317.500	0,30	19.050.000	-	0,00	-	49,20	0,15		9.317.500
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.410.000	0,10	8.000.000	-	0,00	-	50,00	0,05		14.410.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.350.000	0,02	1.000.000	-	0,00	-	50,00	0,01		2.350.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.918.310	0,38	1.037.500	-	0,00	-	55,25	0,21		54.918.310
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	43.792.000	0,30	14.050.000	-	0,00	-	50,00	0,15		43.792.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.375.000	0,09	3.000.000	-	0,00	-	50,00	0,04		12.375.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5.000.000	0,03	2.000.000	-	0,00	-	50,00	0,02		5.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	296.590.500	2,05	88.734.100	80.229.182	27,05	0,55		1,25		216.361.318
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	149.721.800	1,03	59.684.100	37.162.862	24,82	0,26	71,77	0,74		112.558.938
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.692.000	0,43	19.050.000	28.773.420	45,90	0,20	50,00	0,22		33.918.580
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18.675.000	0,13	3.000.000	5.570.000	29,83	0,04	50,00	0,06		13.105.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	7.050.000	0,05	2.000.000	-	0,00	-	50,00	0,02		7.050.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.896.700	0,14	2.000.000	-	0,00	-	50,00	0,07		19.896.700

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.975.000	0,02	1.000.000	-	0,00	-	50,00	0,01		2.975.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.580.000	0,21	-	8.722.900	28,52	0,06	50,00	0,11		21.857.100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.000.000	0,03	2.000.000	-	0,00	-	50,00	0,02		5.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	333.215.194	2,30	99.228.000	12.781.000	3,84	0,09		1,16	Rp	320.434.194
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	128.526.000	0,89	39.137.500	932.000	0,73	0,01		0,45		127.594.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Datad dan Pengkajian Peraturan	128.526.000	0,89	39.137.500	932.000	0,73	0,01	50,37	0,45		127.594.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	204.689.194	1,41	60.090.500	11.849.000	5,79	0,08		0,71		192.840.194
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	19.679.250	0,14	8.250.000	-	0,00	-	50,00	0,07		19.679.250
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	185.009.944	1,28	51.840.500	11.849.000	6,40	0,08	50,45	0,64		173.160.944
TOTAL	14.471.850.979	100,00	3.580.928.983	4.166.043.063		28,79		70,54		10.305.807.916



Penjelasan dari tabel 2.4 di atas adalah terdapat 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana pelaksanaan terhadap Renstra Bappeda tahun 2021-2026. Sebanyak 14 kegiatan memiliki tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kab. Kep. Anambas menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan. Dalam proses perencanaan, Bappeda Kab. Kep. Anambas selalu mengedepankan pendekatan pembangunan yang responsif *gender*, dimana pertimbangan terhadap kebutuhan aspirasi baik laki-laki maupun perempuan selalu menjadi perhatian khusus. Upaya tersebut dilakukan dengan pelaksanaan verifikasi mendalam terhadap Renja PD di Kab. Kep. Anambas yang dilakukan dengan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Pada tahun 2022 Bappeda Kab. Kep. Anambas telah melaksanakan 4 (empat) program dan 14 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program berisi 7 (tujuh) kegiatan yang memiliki capaian indikator pada sebesar 100%.

2. Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan program yang berisi 3 (tiga) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

3. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan program yang berisi 3 (tiga) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

4. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan

Program penelitian dan pengembangan daerah merupakan program yang berisi 1 (satu) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)						Realisasi Capaian (%)		Proyeksi Capaian (%)		Catatan Analisis
				2021	2022	2024	2025	2026	2026	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indikator Kinerja Kunci														
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJMD Ke dalam RKPD		100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja PD														
1.	Capaian Kinerja Perencanaan			85	87	90	91	93	88	89	91	93	95	
2.	Capaian Tindak Lanjut Kerjasama													
3.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100	100	100	100	100	100				
4.	Capaian Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik			90	95	100			92	96				
5.	Capaian Peningkatan Kapasitas Pegawai Di PD			100	100	100			100	100				
6.	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja			20	20	20			20	20				

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda Kab. Kep. Anambas memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bappeda Kab. Kep. Anambas memberikan layanan dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda Kab. Kep. Anambas memberikan layanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, serta melakukan pembinaan di bidang perencanaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bappeda Kab. Kep. Anambas selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah menghadapi permasalahan dan isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
2. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan secara sistematis dan akurat;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
5. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
6. Belum optimalnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)

Permasalahan dan isu penting diatas secara tidak langsung akan memberikan dampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional, seperti SPM dan SDG's. Untuk itu, optimalisasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/

sub kegiatan perlu dilakukan guna mempercepat pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya penghapusan terhadap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif perlu dilakukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperhatikan pembangunan yang bersifat lintas sektor seperti implementasi Kabupaten layak anak yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak dan penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat memperhatikan suatu Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi gagalnya pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir yang disebut dengan *stunting*, dalam hal ini pemerintah di Kabupaten Anambas memperhatikan perencanaan dalam pencegahan stunting dengan prevelensi stunting tahun 2021 sebesar 15,8% menurun menjadi 6,48% pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dukungan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan yaitu dalam mengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran sebagai upaya mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan inovatif yang bersifat holistic-tematik, integratif dan spasial untuk diintegrasikan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Organisasi Perangkat Daerah wajib untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Bappeda Kab. Kep. Anambas membuat suatu inovasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkesinambungan dan smart pemerintah daerah, dengan pembuatan Aplikasi Sepintas agar pembangunan di Kab. Kep. Anambas kedepannya lebih terintegrasi dan smart.

Agenda kegiatan Tahun 2025 akan difokuskan pada pelaksanaan inovasi daerah, mengingat pada Tahun 2022 Kab. Kep. Anambas masih memiliki beberapa catatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil dari rilis Kementrian Dalam Negeri bahwa Kab. Kep.

Anambas dikategorikan sebagai daerah yang kurang inovatif. Penekanan terhadap implementasi inovasi daerah menjadi konsen bagi berbagai pihak di Kab. Kep. Anambas.

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan upaya-upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas dimasa yang akan datang, tantangan yang akan dihadapi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi;
3. Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di pasca pandemi *Covid-19*;
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Awal Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan, dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Nasional	Daerah								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					15.686.795.791,00							17.526.785.421,00					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					15.686.795.791,00							17.526.785.421,00					
5	01	PERENCANAAN					14.966.795.791,00							17.026.785.421,00					
5	01	01					90%	12.492.124.096,00						-	14.126.988.270,00				
5	01	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	-												
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	-												
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	432.165.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		26.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	358.845.045,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		6.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	-		100 %	6.760.119.417,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda	-	6.521.728.490,00	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 Orang/bulan	6.373.159.417,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		6.074.724.591,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	306.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		342.748.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		104.255.899,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-		100 %	210.036.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda	-	395.493.340,00	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			100 Paket	159.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		147.115.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			38 Orang	50.656.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		248.377.910,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	-	100 %	1.059.942.959,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda	-	2.810.355.922,00	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			40 Paket	47.192.130,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		6.752.163,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 Paket	51.794.279,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		113.695.351,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			24 Paket	31.516.936,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		29.508.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			935 Paket	53.124.762,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		185.232.608,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			2 Paket	51.529.852,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		115.930.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		131.769.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	683.785.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		1.979.902.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12 Dokumen	136.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		247.566.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	-	100 %	1.548.661.161,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda	-	1.457.597.800,00	
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	652.156.798,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15 Unit	496.504.363,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		457.597.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	-	100 %	1.978.315.794,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda	-	2.710.191.285,00	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	27.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		13.310.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	120.634.858,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		135.435.716,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.830.680.936,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		2.561.445.569,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	-		100 %	144.038.020,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda	-	198.346.433,00	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			22 Unit	78.038.020,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		58.374.333,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		48.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	36.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		91.972.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	-		100 %	1.518.491.185,00						-	1.421.855.900,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten	-		100 %	1.334.574.585,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat	-	1.175.081.400,00	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													

					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	11.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		16.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	227.869.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		247.869.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan													
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				10 Usulan	54.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		86.161.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	1.041.275.085,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		825.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akses ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah Persentase ketersediaan data untuk perencanaan			80 % 80 %	40.172.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat	-	60.974.600,00	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													

					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			38 Orang	40.172.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		60.974.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	-	85 %	143.744.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat	-	185.799.900,00	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah												
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			6 Laporan	143.744.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		185.799.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	-	94 %	956.180.510,00			-			-	1.477.941.251,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	100 %	515.685.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	-	533.871.663,00	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	124.926.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		146.873.612,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												

					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Laporan	45.734.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		71.484.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Laporan	56.875.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		44.709.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	135.576.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		116.340.048,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	86.198.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		86.949.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	66.375.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		67.514.975,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA	-		100 %	185.954.810,00				-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	-	355.502.719,00	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	11.667.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		107.668.946,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1 Laporan	43.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		43.478.567,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1 Laporan	14.410.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		69.689.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	54.918.310,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		56.248.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1 Laporan	43.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		16.126.396,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1 Laporan	17.375.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		62.290.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	-	100 %	254.540.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	-	588.566.869,00	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	89.721.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		122.672.946,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1 Laporan	62.692.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		55.578.567,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												

					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1 Laporan	48.675.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		81.789.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	19.896.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		61.572.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1 Laporan	2.975.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		207.790.396,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1 Laporan	30.580.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		59.162.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					720.000.000,00							500.000.000,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	-	82 %	720.000.000,00								500.000.000,00	

5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	-		80 %	135.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stake Holder dan Pemangku Kepentingan	-	185.000.000,00	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			1 Laporan	135.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stake Holder dan Pemangku Kepentingan		185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	-		70 %	585.000.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat	-	315.000.000,00	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen	385.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									J U M L A H	15.686.795.791,00								17.526.785.421,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 akan didiskusikan pada pelaksanaan forum PD/ lintas PD. Pembahasan pada diskusi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan. Pada kesempatan ini, dikarenakan proses perencanaan belum memasuki tahapan diatas, penelaahan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda Kab. Kep. Anambas baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD di lingkungan Kab. Kep. Anambas belum dapat dilakukan.



TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH**3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2026. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025 mengusung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”** Visi tersebut dijabarkan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kab. Kep. Anambas tahun 2021-2026 ialah **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II”**. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah;
2. Memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan, dan berbasiskan sektor perikanan dan pariwisata;
3. Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi; dan
4. Melanjutkan pembenahan masalah air bersih, listrik, dan konektivitas wilayah.

Sebagaimana tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan, dan penelitian dan pengembangan, penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kab. Kep. Anambas ditujukan untuk mendukung misi ke-3 (tiga) yaitu "Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi".

Berdasarkan RKPD Kab. Kep. Anambas tahun 2025, tema pembangunan yang diusung ialah : "Penguatan sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan". Dengan 4 rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing.,
- 2) Pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah.,
- 3) Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah.,
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pada penyusunan Renja Bappeda tahun 2025, keselarasan penyusunan Renja Bappeda terdapat pada prioritas ke empat yaitu tentang peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk itu, agenda kerja Bappeda pada tahun 2025 akan diarahkan pada hal-hal demikian.

Memperhatikan hal diatas, kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan (%)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Indeks perencanaan	92.7	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase sasaran RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100
					Persentase program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100
					Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	78
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Indeks RB Bappeda	B (64)	Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78 (BB)
3.	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	75.00	Memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	58,1

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Perumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan di Bappeda Kab. Kep. Anambas didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya penelaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, terutama pada misi ke-3, "menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi". Pada penyusunan Renja Bappeda tahun 2026, terdapat agenda penyusunan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) sebagaimana diketahui merupakan tahapan yang dilakukan pemerintah daerah dikarenakan periodisasi RPJP tahun 2005-2026 dipandang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disusun dokumen RPJP periode 2026-2046.

Rancangan Teknokratik RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) disusun mengingat pada tahun 2025 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala

Daerah serentak. Rancangan Teknokratik disusun berdasarkan pertimbangan teknokratik, dimana teknokratik disusun oleh masing-masing OPD berdasarkan pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh setiap OPD dengan melibatkan tenaga ahli yang difasilitasi oleh Bappeda. Agenda tahun 2025 difokuskan juga kepada pelaksanaan inovasi daerah yang mengingat tahun 2022 Kab. Keb. Anambas dikategorikan sebagai daerah yang kurang inovatif. Penekanan inovasi pemerintah daerah menjadi konsen untuk ditingkatkan.

Pada tahun 2025 agenda kerja Bappeda juga turut memfokuskan dalam rangka dukungan rasional pekerjaan secara optimal, maka pelaksanaan pemindahan kantor dari Jl. Imam Bonjol Selayang Pandang ke Kantor di Jl. Raja Ali Haji Fisabillillah dipandang menjadi sangat penting, untuk itu sejumlah belanja akan difokuskan kepada belanja yang sifatnya mendukung pengadaan ruang kantor yang representatif, maka pada penyusunan Renja Bappeda tahun 2026, mencakup 4 (empat) program, 17 kegiatan, dan 65 sub kegiatan, yaitu :

Tabel 3.2

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Bappeda 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
							Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2					3	4	5
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.686.795.791,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	15.686.795.791,00	
	5	01				PERENCANAAN	14.966.795.791,00	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.492.124.096,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	791.010.745,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
							432.165.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
							358.845.045,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.760.119.417,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

							6.373.159.417,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
							306.960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
							80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.036.000,00	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
							159.380.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
							50.656.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.059.942.959,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
							47.192.130,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
							51.794.279,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
							31.516.936,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
							53.124.762,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
							51.529.852,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
							5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
							683.785.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
							136.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.548.661.161,00	

	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
							400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		
							652.156.798,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
							496.504.363,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.978.315.794,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
							27.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
							120.634.858,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
							1.830.680.936,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.038.020,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
							78.038.020,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		
							30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
							36.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.518.491.185,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.334.574.585,00	
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
							11.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
							227.869.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		
							54.180.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
							1.041.275.085,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40.172.000,00	
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
							40.172.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	143.744.600,00	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
							143.744.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	956.180.510,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	515.685.200,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							124.926.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
							45.734.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
							56.875.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							135.576.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
							86.198.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
							66.375.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	185.954.810,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

							11.667.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
							43.792.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
							14.410.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							54.918.310,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
							43.792.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
							17.375.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	254.540.500,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							89.721.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
							62.692.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
							48.675.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							19.896.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
							2.975.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
							30.580.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	720.000.000,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	720.000.000,00	

	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	135.000.000,00		
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
							135.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	585.000.000,00		
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
							385.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			
							200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	J U M L A H						15.686.795.791,00		



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, & SUB KEGIATAN PRIORITAS KAB.KEP. ANAMBAS TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA

JUMLAH PAGU : Rp. 10.349.682.536,90

SUMBER DANA : APBD KAB. KEP. ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						10.349.682.536,90								11.308.500.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					10.349.682.536,90								11.308.500.000,00		
	5.01	PERENCANAAN					10.199.682.536,90								10.848.500.000,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase indikator program yang tercapai</i>	-			95 Persen	8.484.119.082,00						-	8.865.000.000,00		

5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	-	-	95 %	208.206.000,00	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Perangkat Daerah	-	725.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	79.698.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	-	Perangkat Daerah		285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	4.805.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke-4, periode tahun 2021-2026. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Ranhir Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 akan dijadikan pedoman/acuan bagi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam menjalankan tugas dan fungsi PD. Keberhasilan dalam pelaksanaan Ranhir Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2026 tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas serta peran aktif *stakeholders* dan masyarakat.

Tarempa, 11 September 2025

KERALA BADAN,



ANDY GUNA K. HASIBUAN, ST

Pembina Tk.I

NIP. 19820701 201001 1 019